

Membaca Ulang Pancasila sebagai Landasan Pendidikan

Alim Harun Pamungkas¹, Hardika², Ahmad³

¹Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

* e-mail: alim.harun.2201419@students.um.ac.id

Abstract

This article presents a study of Pancasila as a way of life for the Indonesian nation, specifically in the administration of education. This paper reveals how the universal values in Pancasila play a role in the practice of education towards the prosperity of the nation. This article combines practices in higher education and in non-formal education. This article was written using the bibliography method to provide a comparison of each scientific reference about the study written. This paper shows that the precepts in Pancasila are the crystallization of all disciplines and important aspects of life. Pancasila is the simplicity of complexity from science. Education should be based on values, governance, and prosperity. How knowledge becomes the basis of character that is managed with an awareness of the growth of social justice for all and is oriented towards encouraging the prosperity of the nation.

Keywords: Pancasila; education; values; non-formal; approach

How to cite: Pamungkas, A. (2022). Membaca Ulang Pancasila Sebagai Landasan Pendidikan. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24036/pedagogi.v22i2.1418>



Licenseses may copy, distribute, display and perform the work an make derivative and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these. Licenseses may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for non-commercial purposes

PENDAHULUAN

Pendidikan transformatif yang digagas Paulo Freire tentu tidak dapat digunakan secara penuh sesuai versinya di Indonesia. Hal itu karena latar sosial Amerika Latin yang sudah pasti berbeda dengan Indonesia (Kadir & Pamungkas, 2020). Namun, Pendidikan versi Freire ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia. Misalnya, Pendidikan gaya bank (*Concept of 'banking education'*) yang hanya berpusat pada pengajar (Monologis) barangkali masih sering terjadi dalam proses pendidikan di Indonesia (Ihejirika, 2017). Kritiknya adalah proses semacam ini cenderung tidak membuka ruang dan kesempatan bagi peserta didik/warga belajar untuk berinovasi dan berkreasikan dalam proses pendidikan (Melling & Pilkington, 2018)(Melling & Pilkington, 2018).

Perubahan dan penerapan kurikulum pendidikan baru secara nasional sejatinya ditujukan untuk menjadikan kurikulum pendidikan memiliki relevansi dengan perkembangan zaman masyarakat (Teknologi informasi) dan menjadikan peserta didik/warga belajar berperan lebih aktif dalam pembelajaran (*Student centered oriented*). Namun, pada kenyataannya, pola komunikasi pembelajaran umumnya masih terus dicurigai tidak berubah dari pola *Teacher centered oriented*. Bahkan pasca diterapkannya Kurikulum Merdeka Belajar pada sistem pendidikan formal maupun nonformal.

Penerapan pendidikan transformatif di Indonesia, perlu memperhatikan beberapa hal berikut. *Pertama*, kualitas pendidik. Kualitas pendidik berkorelasi dengan kompetensi pendidik. Pendidik yang kompeten pada dasarnya diyaratkan untuk memiliki kemampuan (*Competence*) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Pendidik, baik pada

pendidikan formal maupun nonformal, bukan lagi sebagai narasumber saja, namun lebih berperan sebagai fasilitator, motivator, dan disseminator (Melling & Pilkington, 2018).

Kedua, sistem pendidikan yang membebaskan. Sistem pendidikan didesain dengan membuka seluasnya ruang dan kesempatan kepada peserta didik/warga belajar untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Pendidikan harus berorientasi pada peserta didik/warga belajar. Artinya, menjadikan peserta didik/warga belajar menjadi subyek dalam proses pembelajaran. Penyederhanaan kurikulum yang digagas melalui Kurikulum Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentu dimaksudkan untuk memastikan terwujudnya kebebasan dalam proses pendidikan. Catatannya, kurikulum baru ini perlu penekanan pada aspek peningkatan pada kompetensi dan karakter.

Ketiga, pembenahan lembaga pendidikan. Setiap satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal harus dapat memberi ruang kebebasan untuk berekspresi kepada para peserta didik/warga belajar. Lembaga pendidikan harus menjadi institusi yang (1) membentuk para peserta didik/warga belajar untuk bebas berpikir, berekspresi dan berkreasi; (2) memperoleh pengetahuan secara akademis sesuai kebutuhan belajarnya. Karena hanya dengan cara demikian, maksud “Merdeka Belajar” dapat terwujud. Yaitu, terwujudnya peserta didik/warga belajar yang cakap intelektual dan berwatak baik.

Pendidikan kritis merupakan gagasan besar yang bertujuan transformatif. Praksis pendidikan berbasis dialog yang merupakan representasi praktik demokrasi dan pikiran-pikiran konstruktivistik (Bentley et al., 2007; Schunk, 2012). Peserta didik/warga belajar merasakan pengalaman belajar yang didasarkan pada bangunan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Hal inilah yang selanjutnya digunakan sebagai instrumen untuk merespon kondisi nyata (Realita) yang ada di masyarakat (Melling & Pilkington, 2018).

Penerapan pendidikan kritis yang transformatif pada pendidikan formal maupun nonformal mestinya tidak saja berada dalam praksis pengajaran, namun juga terdapat dalam visi satuan pendidikan. Hal ini dituntut agar terjadinya keselarasan antara maksud pembelajaran dengan tujuan dari satuan pendidikan. Pembelajaran dituntut untuk mentransformasikan maksudnya pada ruang nyata di masyarakat (Melling & Pilkington, 2018).

Gagasan pembahasan ini dimulai dari pandangan Otto Scharmer tentang *open mind, open heart, dan open will* (Scharmer, 2016). Menurut pandangan tersebut, transformasi haruslah dimulai dari *open main*. Keberanian kita untuk membuka pikiran, melihat-mendengar fakta dan argumentasi, serta pandangan baru yang berkembang. Kita juga mestinya tidak *melulu* berpijak pada hal-hal yang *biasanya* (kebiasaan pandangan yang rutin dijalankan) oleh akademisi atau praktisi selama ini. Namun, kita perlu melihat fakta dan realita, atau mendekat pada sumber-sumber, pandangan berbeda, cara orang melihat, dan cara orang berargumentasi.

Selanjutnya adalah *open heart*, atau membuka hati dengan kebiasaan menempatkan diri kita untuk mendengar dan melihat secara empatik terhadap pandangan orang lain. Kemudian setelah itu adalah *open will*, jadi kita memiliki kendali untuk bersikap *letting go and letting come* (Kesiapan untuk mengucapkan selamat tinggal dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti hal-hal yang telah mapan selama ini, namun korosif). Kemudian, kita bersiap untuk mengucapkan selamat datang kepada perubahan-perubahan yang dapat menjadikan kita lebih kuat dan tentunya lebih maju pada masa mendatang. Keberpihakan terhadap *open mind, open heart, dan open will* dalam pembahasan ini merupakan pilihan yang tepat. Hal ini karena dengan cara tersebut kita dapat melakukan transformasi secara produktif.

PEMBAHASAN

Belajar dari Pendidikan Tinggi

Selanjutnya, pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dari posisi penulis sebagai akademisi bermatra perguruan tinggi. Sebagai penulis dengan latar belakang pendidikan tinggi, tentu akrab dengan tiga darma utama. Darma Pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Ketiganya akan menjadi dasar epistemologik dalam membaca terma pendidikan.

Darma pengajaran dan penelitian umumnya berada dalam imajinasi yang cukup baik dengan sistematika dan heuristikanya. Lahir beragam instrumen yang bahkan mendorong terwujudnya darma ini. Namun, berbeda dengan darma ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat yang umumnya hanya menempati *kursi cadangan* pada *bilik pelengkap* (bukan sesuatu yang sangat fundamental, dan hanya sekedar inkremental saja).

Padahal, darma ketiga, pengabdian, sejatinya bermakna pelayanan (services). Layanan berarti melayani. Objek layanannya adalah masyarakat. Layanan yang diimajinasikan berupa hasil dari hal-hal yang telah diajarkan dan dikembangkan dalam penelitian. Maka, mestinya layanan ini merupakan poros utama dari pengajaran dan penelitian. Keyakinan bahwa apa yang telah diajarkan dan diteliti harus digunakan sebagai bentuk layanan untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan dan kebangsaan. Lebih jauh daripada itu, pendidikan adalah harus diorientasikan sebagai wujud pelayanan bagi usaha usaha memecahkan problem kehidupan dan peradaban bangsa. Artinya, pengajaran, penelitian dan pelayanan tidak bisa dipisahkan, karena ketiganya saling bertautan satu sama lain.

Refleksi Sejarah

Refleksi pada sejarah institusi pendidikan tinggi di Indonesia dapat digunakan untuk memahami keterhubungan ketiga darma dimaksud. Munculnya institusi pendidikan tinggi di Indonesia sesungguhnya merupakan wujud pelayanan dalam usaha memecahkan masalah-masalah kehidupan. Situasi lahirnya Pendidikan tinggi di Indonesia kurang lebih memiliki kemiripan dengan saat ini. Pasca Perang Dunia I, Hindia Belanda kala itu mengalami disrupsi ekonomi dan industri akibat gangguan transportasi di sekitar Lautan India yang menyebabkan hambatan terhadap mobilitas barang dan manusia dari Eropa ke Nusantara. Situasi ini juga diperparah dengan munculnya wabah Flu Spanyol pada 1918-1921 yang menelan korban tidak kurang dari 4,6 juta jiwa di nusantara. Krisis sosial dan krisis patologi tersebut direspon oleh kalangan ekonomi dan industri (Tuan-tuan perkebunan) untuk bangkit pasca krisis dengan mendatangkan kembali tenaga ahli ke nusantara. Gagasan tersebut disusul dengan upaya untuk mendirikan pusat-pusat Latihan tenaga ahli yang berguna pasca krisis, walau upaya tersebut terhambat karena kebijakan pusat Kerajaan Belanda (Latif, 2018b).

Singkat cerita, upaya tersebut berhasil dan didirikanlah Sekolah Menengah Pertanian di Bogor yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal Institut Pertanian Bogor sebagaimana yang dikenal saat ini. Demikian pula dengan Stovia yang saat awal berdirinya hanya khusus untuk memproduksi Mantri Cacar, namun kemudian dinaikkan levelnya menjadi mencetak tenaga ahli dokter. Hal ini memperjelas pemahaman bahwa ihwal dasar ontologis pendidikan adalah usaha untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat atau merespon situasi krisis.

Institusi Pendidikan di Era 4.0

Berdirinya lembaga pendidikan yang mencetak tenaga ahli pertanian dan kesehatan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi menunjukkan corak fragmentasi (Fakultatif) dalam konstribusinya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa semangat ego fakultas sangat tinggi. Namun demikian, sejatinya seluruh upaya fakultatif tersebut mendukung satu tujuan bersama yang lebih luas (*Universe*). Sifatnya saling terhubung satu sama lain.

Pemahaman ini penting, utamanya untuk menghidupkan roh universitas. Hal ini pun mendesak, karena saat ini peradaban manusia telah mengalami disrupsi teknologi dengan berkembangnya revolusi industri 4.0. Pada era ini, fungsi-fungsi taktis dan teknikal perlahan akan digantikan oleh mesin. Oleh karena itu, lembaga pendidikan di masa depan haruslah memberi wawasan yang interdisipliner dan transdisipliner (Latif, 2018a).

Desakan digitalisasi telah mengubah pola berpikir yang nyaris meninggalkan praktik berpikir analog. Pendidikan perlu untuk menemukan pola yang mengawinkan antara praktik digital dengan kemampuan berpikir analog secara holistik. Hal ini karena institusi Pendidikan memiliki tugas utama untuk memberikan layanan dan tidak menjebak diri pada digitalisasi semata yang algoritmik. Pendidikan haruslah tetap berupaya untuk merespon tantangan disrupsi

industri demi terwujudnya pembangunan bangsa dan peradaban manusia yang berkesesuaian zaman (Latif, 2018b).

Misi perguruan tinggi sejak awal adalah untuk mendukung pembangunan melalui layanan Pendidikan yang memadukan antara pengajaran dan penelitian. Dengan demikian, antara praktik pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat menjadi sesuatu yang berjalan dalam *satu tarikan nafas*. Kemajuan ilmu pengetahuan pun mestinya *berjalan serempak* dengan kemajuan pembangunan bangsa. Seperti kemajuan Pohang University of Science and Technology (Postech) Korea Selatan yang sejak awal di desain untuk memenuhi kebutuhan industri baja (Posco). Universitas ini merupakan contoh keterhubungan antara kemajuan layanan sebuah institusi Pendidikan yang sejalan dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Kapabilitas Literasi dan Keberhasilan Pendidikan

Mengutip Amartya Sen, hakekat pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Ia mengkritik secara serius terhadap praktik pembangunan yang menekankan pada indikator-indikator kuantitatif perkapita semata. Karena menurutnya, *income per capita* bukan merupakan dari maju atau tidaknya suatu kehidupan manusia. Kemiskinan menurut Amartya Sen bukan sekadar karena pendapatan perkapita yang rendah, namun lebih dalam dari itu adalah karena tidak memiliki kapabilitas literasi.

Kata kunci dari kualitas adalah kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan bernilai (*Valuable act*) atau merekondisi keadaan yang bernilai (*Valuable state of being*). Intinya kapabilitas itu haruslah mengandung adanya kesempatan (*Opportunity*) dan kebebasan (*Freedom*). Kebebasan dalam meraih dan memiliki *opportunity* untuk mengakses literasi pendidikan, literasi kesehatan, dan/atau literasi kehidupan lainnya. Selain itu, kebebasan juga dimaknai dengan kemerdekaan individu dalam pengembangan diri.

Dalam paradigma Pendidikan berorientasi kapabilitas, kesuksesan pendidikan tidak melulu diukur dari indikator-indikator yang sekadar *input* dan *outcome*. Pada praktiknya, pendidikan disibukkan dengan alat ukur keberhasilan yang hanya dilihat dari sisi input, misalnya rasio dosen dan mahasiswa atau input kurikulum. Lalu *outcome* semacam nilai peserta didik (Warga belajar) atau akreditasi dan sebagainya. Namun, yang terpenting menurut paradigma kapabilitas adalah kebergunaan (*Functioning*) dalam peningkatan kualitas itu secara nyata bagi masyarakat.

Gagasannya adalah untuk mengukur keberhasilan suatu praktik pendidikan, perlu diperhatikan tentang hakikat pembangunan dan pendidikan. Pendidikan memiliki nilai-nilai yang prinsip/esensi, konstan, instrumental, dan nilai-nilai yang bersifat pragmatis. Nilai prinsipil itu tidak berubah sepanjang berjalannya waktu, karena yang berubah adalah nilai pragmatis dan instrumentalnya.

Pendekatan Nilai

Menurut Ki Hadjar Dewantara, nilai esensi pendidikan merupakan proses belajar untuk menjadi manusia yang seutuhnya melalui proses belajar dari kehidupan yang berlangsung sepanjang hayat (*lifelong*). Manusia seutuhnya yang dimaksud adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara: (1) dimensi jasmani dan rohaninya; (2) dimensi individu dan dimensi sosialnya; dan (3) dimensi universal dan partikularnya. Oleh karena itu, yang *pertama*, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesehatan jasmani, pertumbuhan jasmani itu perlu diajarkan, namun tentu tidak cukup di situ. Pemelajar perlu untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesehatan rohani. Ilmu tentang nilai, karakter, dan budaya (Nisa et al., 2020).

Kedua, keseimbangan antara individu dan sosial. Manusia setiap pribadi adalah istimewa dengan kecenderungan khasnya masing-masing, serta mempunyai intelegensianya masing-masing. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh berhenti hanya pada Pendidikan berbasis *class center*. Pendidikan di masa depan harus berorientasi kepada ragam preferensi kecerdasan Insani. Setiap manusia memiliki potensi khas dan dengan kekhasannya itu, manusia dapat berkontribusi bagi kemanusiaan. Pada saat yang sama jangan sampai keistimewaan individual tersebut itu justru membangun *chaos* bagi kebersamaan. Akan tetapi, keistimewaan pribadi haruslah membangun harmoni bagi kebersamaan. Dengan demikian, tatanan sosial juga harus diperbaiki. Semisal,

bagaimana manusia dalam masyarakat dapat hidup rukun dan damai. Atau bagaimana membangun sebuah tata Kelola pemerintahan dan politik yang baik.

Ketiga, keseimbangan antara makhluk universal dan partikular. Hal ini dipahami bahwa bagaimanapun manusia itu, apapun ras, etnis, dan agamanya, mereka sejatinya adalah memiliki unsur-unsur universal (Tulang yang sama-sama berwarna putih, dan darah yang sama-sama berwarna merah). Menurut biologi molekuler, manusia dipahami berasal dari induk yang sama. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk berkontribusi bagi kemanusiaan universal dengan belajar secara terbuka (Kosmopolitan) dari aspek baik kemanusiaan dari manapun. Karena pada saat yang sama, manusia selama masih memiliki daging dalam tubuhnya, maka dia terikat pada ruang dan waktu karena manusia bukan jin, sehingga manusia tidak dapat dipisahkan dari ruang hidup yang berbeda-beda. Ada manusia yang hidup di padang pasir, di Savana, dan ada pula manusia yang hidup di Kawasan subur yang hijau. Karena manusia dituntut untuk merespon tantangan lingkungannya, maka terbentuklah partikularitas budaya (Ferary, 2021).

Globalisasi tidak akan pernah dapat menghabisi partikularitas budaya. Peserta didik (Warga belajar) perlu difasilitasi untuk belajar tentang ruang hidupnya (Di mana dia hidup), kekhasan budaya dan lingkungannya. Hal ini agar mereka mampu merespon tantangan-tantangan yang spesifik (Khas) tersebut. Di lain sisi, mereka pun perlu dipandu untuk memiliki wawasan yang sifatnya kosmopolitan.

Berdasar pada pemahaman nilai-nilai yang prinsipil tersebut, Ki Hadjar Dewantara selanjutnya menyebut bahwa pendidikan pada dasarnya adalah pendidikan budi pekerti. Tentu tidak sekadar tentang sopan santun sebagaimana distorsi makna saat ini, melainkan Pendidikan berkebudayaan. Budi itu berarti pikiran, perasaan, dan kemauan. Pekerti artinya tenaga atau daya. Ringkasnya, “budi” dipahami sebagai aspek batiniah, dan “pekerti” merupakan aspek lahiriah. Dengan demikian, Pendidikan budi pekerti adalah pertautan antara pendidikan berdimensi batin dengan pendidikan berdimensi lahir. Harapannya, *outcome* dari pendidikan adalah sosok manusia yang baik (etik), benar (logik), dan indah (estetik).

Kata lainnya, pendidikan sebagai proses kebudayaan harus memberikan kesempatan bagi peserta didik (Warga belajar) untuk: (1) olah pikir; (2) olah rasa; (3) olah karsa; dan (3) olah raga. Olah pikir dapat terwujud dalam pembelajaran literasi, critical thinking, problem solving, mathematics, dan/atau numerasi. Lalu, olah rasa berupa estetika, spiritualitas, solidaritas, sportifitas, kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air. Berikutnya, olah karsa, seperti imajinasi dan kreatifitas. Selanjutnya, olah raga, hal ini berhubungan dengan ketangkasan dan keterampilan. Dengan demikian, hakikat pendidikan sampai kapanpun harus mempertahankan keseimbangan antara pikir, rasa, karsa dan raga (Pitriadi et al., 2022).

Pada zaman digitalisasi saat ini, olah rasa dan olah karsa menjadi sesuatu yang sangat penting. Digitalisasi, menjadikan hampir semua hal dapat digantikan oleh komputer. Namun ada hal yang tidak bisa digantikan, yaitu imajinasi, emosi, estetika, sehingga hal-hal tersebut semakin penting untuk diajarkan. Karena tanpa imajinasi dan emosi, teknologi akan mengalami hambatan fungsi. Artinya, kita tidak perlu merasa cemas dengan kemampuan teknis dalam pemanfaatan teknologi, melainkan kita justru harus menaruh kecemasan apabila para peserta didik (Warga belajar) berkemampuan teknis, namun tidak memiliki rasa dan imajinasi tentang teknologi yang digunakan. Kemampuan teknis saja tidak akan dapat menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat, kecuali dilengkapi dengan rasa dan imajinasi.

Strategi Kebudayaan

KI Hadjar Dewantara merekomendasi sebuah kata kunci yang dapat digunakan untuk menggerakkan kemajuan suatu peradaban bangsa. Istilah yang disebut “Tri kon”, merupakan kulminasi dari kontinyu (*Continue*), konvergen (*Convergent*), dan konsentris (*Concentric*). *Pertama*, kontinyu, artinya bahwa praktik atau muatan pengajaran dan kajian pendidikan haruslah memiliki keterhubungan maknawi dengan (*Local genius*) sumberdaya, consensus, warisan, dan nilai-nilai “lampau”. Hal inilah yang disebut oleh Otto Scharmer sebagai *Learning from the past*

(Scharmer, 2016). Tidak ada bangsa atau negara yang berperadaban maju, tanpa menghargai warisan budayanya (Ferary, 2021).

Kedua, konvergen. Pendidikan mestinya terhubung dengan perkembangan teknologi dan ragam perkembangan yang terjadi di “dunia luar”. Selain itu, pendidikan juga perlu terhubung dengan kecenderungan baru atau *Learning from the future* (Scharmer, 2016). Belajar dari tren dan kebaruan yang terjadi. Selanjutnya yang *ketiga*, konsentris. Pendidikan harus mendorong peserta didik (Warga belajar) untuk menjadi warga dunia dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kepribadian. Berpikir kosmopolit dan bertindak lokalit dalam waktu yang bersamaan.

Pendekatan Pancasila

Sila-sila Pancasila merupakan kristalisasi dari seluruh disiplin ilmu dan aspek-aspek penting dalam kehidupan. Sila pertama berhubungan dengan aspek-aspek psikologistik, simbolik, dan spiritualitas yang berkaitan dengan tata nilai dan etika. Sila kedua, berkaitan dengan aspek-aspek globalisasi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Sila ketiga, berkaitan dengan multikulturalisme dan *biodiversity*, ilmu yang berhubungan dengan keragaman biota dan manusia. Sila keempat, berkaitan dengan aspek-aspek rekonsiliasi, *networking*, pembangunan berbasis *win-win solution*. Lalu, sila kelima, berkaitan dengan aspek-aspek kesejahteraan. Hal ini sebagaimana yang disebut oleh Yudi Latif sebagai *basic simplicity* dan *complexity* (Latif, 2018b).

Pancasila merupakan *simplicity* dari *complexity* ilmu pengetahuan. Kalau seluruh disiplin ilmu itu dikristalisasi, maka akan terhimpun dalam sila-sila dalam Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila mengandung tiga aspek. *Pertama*, tata nilai. Ini berbasis pada mental, spiritual, dan karakter yang terdapat pada Sila satu, sila dua, dan sila tiga. Ketiga sila tersebut dipahami sebagai *ejawantah* dari hubungan antara manusia dengan Tuhan, lalu hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Ekstraksi yang menjadi dasar tindakan manusia (basis karakter), baik dalam pendidikan ataupun lainnya.

Kedua, tata kelola. Ini berhubungan dengan moralitas, dan hal ini membutuhkan institusi. Sila empat merupakan dasar dari tata kelola ini. Karena apapun kehendak manusia dalam bermasyarakat membutuhkan tata kelola, missal tata kelola politik, ekonomi, pertanian, dan sebagainya. Hal ini penting, sebab tidak sedikit contoh kegagalan sebuah negara adalah karena kegagalan mereka dalam pembentukan institusi-institusi ini. *Ketiga*, tata sejahtera. Ini berhubungan dengan dimensi material dan teknologi. Tidak ada manusia yang dapat berkembang tanpa keadilan sosial (Cara berbagi) dan kemakmuran (Cara menumbuhkan). Sebuah negara bisa jadi memiliki sumberdaya yang berlimpah, namun akan bermasalah jika tidak memiliki kemampuan dalam memobilisasi kemakmuran (Latif, 2018a).

KESIMPULAN

Penjelasan ini meringkas maksud bahwa pendidikan semestinya berbasis pada tata nilai, tata Kelola, dan tata sejahtera. Bagaimana pengetahuan menjadi basis karakter yang dikelola dengan kesadaran penumbuhan keadilan sosial bagi semua dan berorientasi pada terdorongnya kemakmuran bangsa.

REFERENSI

- Bentley, M., Fleury, S. C., & Garrison, J. (2007). Critical Constructivism for Teaching and Learning in a Democratic Society. *Journal of Thought*, 42(3–4), 9. <https://doi.org/10.2307/jthought.42.3-4.9>
- Ferary, D. (2021). On Ki Hadjar Dewantara’s Philosophy of Education. *Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)*, 5(2), 65–78. <https://doi.org/http://doi.org/10.7577/njcie.4156> On
- Ihejirika, I. C. (2017). a Constructivist Appraisal of Paulo Freire’S Critique of Banking System of Education. *European Journal of Educational and Development Psychology*, 6(1), 1–13.
- Kadir, H. A., & Pamungkas, A. H. (2020). Anthropology as an Educational Practice and Its Current Challenges. *KOLOKIUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 8(2), 114–124. <https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v8i2.424>

- Latif, Y. (2018a). Identitas Keindonesiaan dan Aktualisasi Pancasila bagi Generasi Milenial di Era Digital. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 33, 5–19.
- Latif, Y. (2018b). The religiosity, nationality, and sociality of pancasila: Toward Pancasila through Soekarno's way. *Studia Islamika*, 25(2), 207–245. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i2.7502>
- Melling, A., & Pilkington, R. (2018). Paulo Freire and transformative education: Changing lives and transforming communities. In *Paulo Freire and Transformative Education: Changing Lives and Transforming Communities*. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-54250-2>
- Nisa, A. F., Prasetyo, Z. K., & Istiningsih. (2020). The Teachings of Ki Hadjar Dewantara in Improving the Character of Elementary School Students in the Revolution of Industry 4.0 Era*. *International Conference on Educational Research and Innovation (ICERI 2019)*, 401(Iceri 2019), 49–56. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200204.010>
- Pitriadi, A. P., Syaodih, E., Sopandi, W., & ... (2022). Implementation of Ki Hadjar Dewantara's Education Concept in Implementing Student Character in Class IV Elementary School. *ICEE-4 "The Direction of Elementary Education in the Future Challenge,"* 18–27.
- Scharmer, C. O. (2016). *Theory U: Learning From the Future as It Emerges* (2nd ed.). Berrett Koehler Publishers, Inc.
- Schunk, D. H. (2012). Learning Theories An Educational Perspective. In P. Smith (Ed.), *Space Science Reviews* (Sixth Edit). Pearson Education, Inc., publishing as Allyn & Bacon. <https://doi.org/10.1007/BF00751323>